

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ani Purwati, 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

Annisa, N. F. 2017. *Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. Lex et Societatis*.

Cholid Narbuko, 2023. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Edita Elda, 2021. *Korupsi Dalam Keadaan Tertentu*. Jakarta: Rajawali Press.

Elwi Danil, 2021. *Korupsi Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Feri Amsari dan Khairul Fahmi. 2015. *Obstruction of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Penegakan Hukum dalam Upayah Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Themis Books.

Lamintang, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafik: Jakarta.

Lusia Sulastri, 2023. *Pengaruh Obstruction of Justice Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Sistem Peradilan Di Indonesia*, Surabaya: Pustaka Aksara.

Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Muhammad Busyro Muqoddas, 2025. *Menegakkan Etika Penegak Hukum*. Yogyakarta: LkiS.

Muhammad Siddiq Armia, 2022. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.

Nur Solikin, 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media.

Oemar Seno Adji dan Insriyanto Seno Adji, 2017. *Peradilan Bebas dan Contempt of Court*. Jakarta: Diadit Media.

Romli Atmasasmita, 2005. *Rekonstruksi Teori Hukum Pidana Korupsi Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Shinta Agustina, 2015. *Obstruction of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Themis Book.

Teguh Prasetyo, 2015. *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Korupsi*. Surakarta: Yustisia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri DKI Jakarta Nomor.

90/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Negeri DKI Jakarta Nomor 13/PID.SUS-

TPK/2019/PT.DKI.

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021

D. Jurnal

Afifah dan Julianis, 2023. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku
Obstruction of Justice dalam Tindak Pidana." *Lex Renaissance*. 2023.

Andhika Prasetya Putra, 2022. Implementasi Pasal 21 UU Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi dalam Penegakan Hukum *Obstruction of Justice*
. *Jurnal Hukum Prioris*. Vol. 11. No. 2. 2022

Anis, et al, 2023. "Analisis Putusan Hakim dalam Penerapan Teori Retributif
Dikaitkan dengan Rasa Keadilan bagi Korban pada Tindak Pidana
Penganiayaan". *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2): 575–584.

Ario Febi Ferdika, et al, 2022. "Kedudukan Kejaksaan di Indonesia." *Journal
of Constitutional Law*, Vol. 2 No. 1. 2022.

Asmawi, 2009. Relevansi Teori Masalahat dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*. Vol. 1. No. 2. 2009.

Bayu Dwi Herlambang, 2019. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Vol. 26. No. 2. 2019.

Bernadus Barat Daya, 2019. Memperkuat KPK. Memberantas Korupsi. *Jurnal Lex Librum*. Vol. 5. No. 2. 2019.

Erdhy Widyatama Suparno, et al, 2026. “Disparitas Pemidanaan Korupsi Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan Publik”. *Jurnal USM Law Review*, 9(1): 341–360.

Ismail Pettanasse, et al, 2024. Tindak Pidana “*Obstruction of Justice*” dalam Pengaturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, *Journal of Sharia and Legal Science*, Vol. 2 No. 2.

Kadek Indah Bijayanti dan A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, 2021. Pertanggungjawaban Pidana Advokat pada *Obstruction of Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Kertha Wicara*. Vol. 9. No.4. 2021

Keren Shallom Jeremiah dan Karina Hasiynni Manurung, 2022. “Analisis *Obstruction of Justice* oleh Aparat Kepolisian.” *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 4 No. 2.

Mayrachelia, D. S. & Cahyaningtyas, I. (2022). Karakteristik Perbuatan Advokat yang Termasuk Tindak Pidana *Obstruction of Justice*

Berdasarkan Ketentuan Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 121-132.

Melati Theresia Terok, et al, 2021. Syarat Materiil Surat Dakwaan Menurutpandangan Doktrin Serta Praktik Peradilan Pidana. *Lex Crimen*. Vol. X. No. 2. 2021.

More, M., et al, 2023. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pengadilan yang Berbeda. *Jurnal Sosial dan Sains*, 3(5), 483–502.

Muhammad Fadli dan Rahmi Amalia, 2020. Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 50. No. 1. 2020.

Muhammad Syarifudin, 2018. Perlindungan Saksi dalam Kasus *Obstruction of Justice* di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*. Vol. 8. No. 1. 2018.

Prasetiono, et al, 2022. “Implementasi Pidanaan Pelaku Penyertaan (*Deelneming*) Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal USM Law Review*, 5(2): 647–662.

Suryadi, M. dan Zainal. M, 2024. Analisis Perbuatan Menghalangi Proses Penyidikan, Penuntutan Dan Peradilan (*Obstruction of Justice*) Dalam Sistem Pidana Di Indonesia. *Justness : Jurnal Hukum Politik dan Agama*.

Teguh Prasetyo, 2015. Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia*. Vol. 22. No. 1. 2015.

Yuliastuti Eka, 2020. Problematika yang Dihadapi Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Karanganyar). *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 8. No. 1. 2020.

E. Internet

Ilham Kurniawan Dartias, 2022. Menerapkan *Obstruction of Justice* dalam Kasus Korupsi. <https://jambiupdate.co/artikel-menerapkan-obstruction-of-justice-dalam-kasus-korupsi.html>, diakses pada 17 Juni 2025.

Floria Dianti, 2025. Apa Perbedaan Alat Bukti dengan Barang Bukti. <https://www.hukumonline.com>.

F. Skripsi

Allivia Putri Gandini, 2018. Kebijakan Kriminalisasi *Obstruction of Justice* Sebagai Delik Tindak Pidana Korupsi. *Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Indonesia*.

Muh. Arham Latif, 2017. Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks). Makassar: *Skripsi Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Alauddin*.

Tamara Maulida Pohan, 2019. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika. Tebing Tinggi: *Skripsi Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara*.

G. Kamus

Fienso Suharsono, 2010. *Kamus Hukum*. Jonggol: Vandetta Publishing.